



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.221, 2012

PENGESAHAN. *Agreement.* Republik Indonesia-  
Hongaria. Pembebasan Visa.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 91 TAHUN 2012

TENTANG

PENGESAHAN

PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
DAN PEMERINTAH HONGARIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI  
PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (*AGREEMENT BETWEEN  
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE  
GOVERNMENT OF HUNGARY ON THE EXEMPTION OF VISA  
REQUIREMENTS FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC  
AND SERVICE PASSPORTS*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 24 April 2012 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Hongaria mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Hungary on the Exemption of Visa Requirements for Holders of Diplomatic and Service Passports*), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Hongaria;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETU-JUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH HONGARIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF HUNGARY ON THE EXEMPTION OF VISA REQUIREMENTS FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS*).

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Hongaria mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of*

*Hungary on the Exemption of Visa Requirements for Holders of Diplomatic and Service Passports*) yang telah ditandatangani pada tanggal 24 April 2012 di Jakarta, yang naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Hongaria, dan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Persetujuan dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Hongaria, dan Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah Persetujuan dalam Bahasa Inggris.

### Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Oktober 2012  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Oktober 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN



**REPUBLIK INDONESIA**

**PERSETUJUAN  
ANTARA  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
PEMERINTAH HONGARIA  
MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR  
DIPLOMATIK DAN DINAS**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Hongaria, selanjutnya disebut "Para Pihak";

**MENIMBANG** hubungan bersahabat antara Para Pihak;

**BERHASRAT** untuk memperkuat hubungan bersahabat dan kerja sama mereka lebih lanjut dengan memfasilitasi masuknya pemegang paspor diplomatik dan dinas Republik Indonesia dan Hongaria;

**SESUAI** dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing;

Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

**Pasal 1  
PEMBEBASAN VISA**

1. Warga negara Republik Indonesia, yang memiliki paspor diplomatik atau paspor dinas yang sah, dapat masuk dan meninggalkan wilayah Hongaria tanpa visa dan tinggal disana tanpa izin tinggal untuk suatu jangka waktu tinggal yang tidak melebihi sembilan puluh (90) hari dalam jangka waktu seratus delapan puluh (180) hari sejak tanggal pertama masuk.
2. Warga negara Hongaria, pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang sah, wajib tidak dipersyaratkan untuk memperoleh visa untuk masuk, singgah dan tinggal di wilayah Republik Indonesia untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi tiga puluh (30) hari, terhitung sejak setiap tanggal masuk.



**Pasal 2**  
**VISA BAGI ANGGOTA MISI DIPLOMATIK ATAU KONSULER**

Warga negara dari salah satu pihak, yang merupakan pemegang paspor diplomatik atau dinas yang ditugaskan sebagai anggota misi diplomatik atau pos konsuler serta perwakilan organisasi internasional, yang bertempat di wilayah Pihak lain, termasuk anggota keluarga yang merupakan bagian rumah tangga mereka wajib dipersyaratkan untuk memperoleh visa sebelum memasuki wilayah Pihak tersebut.

**Pasal 3**  
**PERSYARATAN KELUAR DAN MASUK**

Warga negara Para Pihak, pemegang paspor diplomatik atau dinas yang tercantum di Pasal 1 Persetujuan ini, dapat masuk dan keluar dari wilayah Pihak lain melalui titik-titik pelintasan batas yang diperuntukkan bagi lalu lintas perjalanan internasional.

**Pasal 4**  
**MASA BERLAKU PASPOR**

Masa berlaku paspor diplomatik atau dinas yang dimiliki warga negara masing-masing Pihak sekurang-kurangnya enam (6) bulan pada saat tanggal masuk ke wilayah Pihak lain.

**Pasal 5**  
**HAK PIHAK BERWENANG**

1. Persetujuan ini tidak akan mengecualikan warga negara masing-masing Pihak pemegang paspor diplomatik atau dinas dari kewajiban untuk menghormati hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Pihak lain.
2. Persetujuan ini tidak akan mempengaruhi hak pihak berwenang dari masing-masing Pihak untuk menolak izin masuk atau mempersingkat jangka waktu tinggal di wilayah dari warga negara Pihak lainnya, yang tersebut di Pasal 1, yang dianggap tidak dikehendaki atau dianggap berbahaya bagi kedamaian masyarakat, ketertiban umum, kesehatan umum atau keamanan nasional.

#### **Pasal 6 PENUNDAAN**

1. Masing-masing Pihak dapat secara sementara menunda, secara sebagian atau keseluruhan, pelaksanaan dari Persetujuan ini untuk alasan keamanan nasional, ketertiban masyarakat atau kesehatan umum.
2. Pihak lain harus diberitahukan melalui saluran diplomatik dalam waktu tiga puluh (30) hari mengenai penundaan dan berlaku kembalinya Persetujuan ini.
3. Penundaan pelaksanaan Persetujuan ini wajib tidak mempengaruhi hak-hak dari warga negara, yang tercantum di Pasal 1 Persetujuan ini, yang sudah terlebih dahulu tinggal di wilayah negara Penerima.

#### **Pasal 7 CONTOH DAN PENERBITAN PASPOR ATAU DOKUMEN PERJALANAN**

1. Para Pihak wajib saling bertukar contoh-contoh paspor diplomatik dan dinas mereka melalui saluran diplomatik dalam waktu tiga puluh (30) hari sebelum berlakunya Persetujuan ini.
2. Dalam hal pengenalan paspor diplomatik dan paspor dinas baru, serta modifikasi terhadap yang telah ada, Para Pihak wajib mengirimkan contoh-contoh dari paspor-paspor tersebut dan saling memberitahukan setiap perubahan tersebut secara tertulis, melalui saluran diplomatik tidak lebih dari tiga puluh (30) hari sebelum pengenalan resminya.
3. Dalam hal warga negara dari salah satu Pihak kehilangan atau rusak paspor diplomatik atau dinasnya di wilayah negara Pihak lainnya, mereka wajib segera memberitahukan kepada pejabat berwenang di negara Pihak yang menerima melalui misi diplomatik atau pos konsuler negara yang bersangkutan. Misi diplomatik atau pos konsuler yang bersangkutan wajib menerbitkan kepada orang dimaksud, sesuai dengan undang-undangan nasionalnya, suatu dokumen untuk kembali ke negara asalnya.

#### **Pasal 8 PERUBAHAN**

Persetujuan ini hanya dapat diubah berdasarkan kesepakatan bersama secara tertulis oleh Para Pihak. Perubahan atau revisi tersebut wajib mulai berlaku sesuai dengan Pasal 10 ayat 1 Persetujuan ini, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini.

**Pasal 9**  
**PENYELESAIAN SENGKETA**


Setiap perbedaan atau perselisihan yang timbul di antara Para Pihak berkaitan dengan pelaksanaan atau penafsiran dari Persetujuan ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan perundingan antara Para Pihak tanpa merujuk Pihak ketiga atau pengadilan internasional.

**Pasal 10**  
**PEMBERLAKUAN, MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN**

1. Persetujuan ini mulai berlaku tiga puluh (30) hari sejak tanggal penerimaan, pemberitahuan tertulis, melalui saluran diplomatik, , dimana Para Pihak akan memberitahukan satu sama lainnya secara resmi bahwa prosedur internal masing-masing bagi berlakunya Persetujuan ini telah dipenuhi.
2. Persetujuan ini ditandatangani untuk waktu yang tidak ditentukan, kecuali salah satu Pihak memutuskan untuk mengakhiri Persetujuan ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lain melalui saluran diplomatik. Pengakhiran tersebut akan berlaku sembilan puluh (90) hari setelah tanggal penerimaan pemberitahuan tertulis mengenai Pengakhiran dari Pihak lain.

**Dibuat** di Jakarta, pada **24** April **2012**..... dalam dua rangkap asli dalam Bahasa Indonesia, Hongaria, dan Inggris, semua naskah memiliki keabsahan yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, maka naskah Bahasa Inggris yang berlaku.

**UNTUK PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

  
**R.M. Marty M. Natalegawa**  
Menteri Luar Negeri

**UNTUK PEMERINTAH  
HONGARIA**

  
**János Martonyi**  
Menteri Luar Negeri



REPUBLIK INDONESIA

**MEGÁLLAPODÁS**  
**AZ INDONÉZ KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA**  
**ÉS**  
**MAGYARORSZÁG KORMÁNYA**  
**KÖZÖTT A DIPLOMATA ÉS SZOLGÁLATI ÚTLEVÉLLEL RENDELKEZŐ**  
**ÁLLAMPOLGÁRAIK VÍZUMMENTESSÉGÉRŐL**

az Indonéz Köztársaság Kormánya és Magyarország Kormánya (a továbbiakban: „Felek”),

a két fél között fennálló baráti kapcsolatokra figyelemmel,

attól a szándéktól vezérelve, hogy a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik beutazásának megkönnyítésével megerősítsék a az Indonéz Köztársaság és Magyarország közötti baráti kapcsolatok fejlődését és az együttműködést, valamint

a két ország vonatkozó jogszabályainak figyelembe vételével

az alábbiakban állapodnak meg:

**1. Cikk**  
**VÍZUMMENTESSÉG**

1. Az Indonéz Köztársaság diplomata vagy szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgárai, az első belépéstől számított száznyolcvan (180) napos időszakonként kilencven (90) napot meg nem haladó időtartamra vízum nélkül utazhatnak be, és hagyhatják el Magyarország területét, illetve ott tartózkodásra jogosító engedély nélkül tartózkodhatnak.
2. Magyarország érvényes diplomata vagy szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgárai, a belépéseiktől számított harminc (30) napot meg nem haladó időtartamra vízum nélkül utazhatnak be, utazhatnak át, és vízum nélkül tartózkodhatnak az Indonéz Köztársaság területén.

**2. Cikk****A DIPLOMÁCIAI VAGY KONZULI KÉPVISELETEK TAGJAINAK VÍZUMA**

Az egyik Fél államának a másik Fél államában akkreditált diplomáciai vagy konzuli képviseletein, valamint a másik Fél államának területén működő nemzetközi szervezeteknél szolgálatot teljesítő azon állampolgárai, akik érvényes diplomata vagy szolgálati útlevéllel rendelkeznek, valamint ezen személyekkel közös háztartásban élő családtagjaik, előzetesen kiállított vízum birtokában léphetnek be a másik Fél államának területére.

**3. Cikk****A BE- ÉS KIUTAZÁS FELTÉTELEI**

A Felek jelen Megállapodás 1. cikke szerinti diplomata vagy szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgárai a másik Fél államának területére történő belépésre és az onnan való kilépésre a nemzetközi határforgalom számára nyitva álló határátkelőhelyeket vehetik igénybe.

**4. Cikk****AZ ÚTLEVEK ÉRVÉNYESSÉGE**

Az egyik Fél diplomata vagy szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgárainak a másik Fél államának területére történő beutazáskor a belépés időpontjától számított legalább hat (6) hónapig érvényes úti okmánnyal kell rendelkezniük.

**5. Cikk****HATÓSÁGOK JOGAI**

1. A jelen Megállapodás rendelkezései nem mentesítik a másik Fél diplomata vagy szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgárait azon kötelezettség alól, hogy a másik Fél államának területén hatályban lévő jogszabályokat betartsák.
2. Mindkét Fél fenntartja a jogot, hogy az 1. cikkben meghatározott állampolgáraiknak a másik Fél államának területére történő beutazását az illetékes hatóságaik megtagadják vagy az ott tartózkodásukat lerövidítsék, ha azok közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okból nem kívánatosnak, illetve veszélyesnek minősülnek.



## **6. Cikk**

### **FELFÜGGESZTÉS**

1. Közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okból a Felek bármelyike részben vagy egészben, ideiglenesen felfüggesztheti a jelen Megállapodás alkalmazását.
2. A felfüggesztés bevezetéséről és annak feloldásáról h arminc (30) napon belül diplomáciai úton értesíteni kell a másik Felet.
3. A jelen Megállapodás alkalmazásának felfüggesztése nem érinti a jelen Megállapodás 1. cikke szerinti azon állampolgárok jogait, akik a felfüggesztés időpontjában már a másik Fél államának a területén tartózkodnak.

## **7. Cikk**

### **ÚTLEVÉL VAGY ÚTI OKMÁNY MINTÁK**

1. A Felek a jelen Megállapodás hatályba lépésétől számított harminc (30) napon belül diplomáciai úton megküldik egymásnak diplomata és szolgálati útleveleik mintapéldányait.
2. Amennyiben a Felek új diplomata és szolgálati útleveleket bocsátanak ki, vagy módosítják a forgalomban lévő útleveleiket, ezeknek az útleveleknek a mintapéldányait a kibocsátást vagy módosítást megelőzően legalább harminc (30) nappal diplomáciai úton eljuttatják a másik Fél részére.
3. Amennyiben valamelyik Fél állampolgára a másik Fél területén elveszíti diplomata vagy szolgálati útlevelét, vagy az megrongálódik, az állampolgársága szerinti állam diplomáciai vagy konzuli képviseletén keresztül azonnal értesíti erről a fogadó állam illetékes hatóságait. Az érintett diplomáciai vagy konzuli képviselet államának belső jogszabályaival összhangban az említett személynek hazatérésre jogosító úti okmányt állít ki.

## **8. Cikk**

### **A MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA**

A jelen Megállapodás kizárólag a Felek közötti kölcsönös írásbeli megegyezéssel módosítható. Ez a módosítás a jelen Megállapodás 10. Cikkének 1. pontjában foglaltaknak megfelelően lép hatályba, és a jelen Megállapodás szerves részét képezi.

**9. Cikk**  
**JOGVITÁK RENDEZÉSE**

A jelen Megállapodás végrehajtása vagy értelmezése során felmerülő vitákat a Felek békésen, tárgyalások és konzultációk útján, harmadik állam vagy nemzetközi bírói fórum bevonása nélkül rendezik.

**10. Cikk**  
**HATÁLYBALÉPÉS, ÉRVÉNYESSÉG, FELMONDÁS**


1. A jelen Megállapodás a hatálybalépéshez szükséges belső jogi eljárások teljesítéséről szóló írásbeli, diplomáciai úton történt értesítések közül az utolsó kézhezvételétől számított harmincadik (30.) napon lép hatályba.
2. A jelen Megállapodás határozatlan időre szól, azt bármelyik Fél írásban, diplomáciai úton felmondhatja. A jelen Megállapodás a felmondásról szóló értesítés kézhezvételétől számított kilencvenedik (90.) nap elteltével szűnik meg.

A jelen Megállapodás Jakartában, 2012. április 24., 2012.-én kelt, két eredeti példányban, indonéz, magyar és angol nyelven, melyek közül mindegyik szöveg egyaránt hiteles. Értelmezésbeli különbségek esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

az Indonéz Köztársaság Kormánya  
névében:

  
**R.M. Marty M. Natalegawa**  
Külgyminiszter

Magyarország Kormánya  
névében:

  
**János Martonyi**  
Külgyminiszter



REPUBLIK INDONESIA

**AGREEMENT  
BETWEEN  
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
AND  
THE GOVERNMENT OF HUNGARY  
ON THE EXEMPTION OF VISA REQUIREMENTS FOR HOLDERS OF  
DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS**

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of Hungary, hereinafter referred to as "the Parties";

**CONSIDERING** the friendly relations between the Parties;

**DESIRING** to further strengthen their friendly relations and cooperation by facilitating the entry of holders of diplomatic and service passports of the Republic of Indonesia and Hungary;

**PURSUANT** to the prevailing laws and regulations of the respective countries;

Have agreed as follows:

**Article 1  
VISA EXEMPTION**

1. Nationals of the Republic of Indonesia, who are in possession of a valid diplomatic or service passports, may enter and leave the territory of Hungary without a visa and stay there without a permission for residence for a period of stay not exceeding ninety (90) days within a period of one hundred and eighty (180) days from the time of their first entry.
2. Nationals of Hungary, holders of valid diplomatic or service passport, shall not be required to obtain a visa to enter, transit and stay in the territory of the Republic of Indonesia for a period of stay not exceeding thirty (30) days, counted from the date of each entry.



**Article 2****VISA FOR MEMBERS OF DIPLOMATIC OR CONSULAR MISSION**

Nationals of either Party, who are holders of valid diplomatic or service passport and assigned as members of diplomatic missions or consular posts as well as representatives of international organisations, located in the territory of the other Party, including their family members belonging to their household shall be required to obtain appropriate entry visa prior to their entry.

**Article 3****ENTRY AND EXIT CONDITIONS**

Nationals of the Parties, holders of valid diplomatic or service passport mentioned in Article 1 of this Agreement, may enter and leave the territory of the State of the other Party at any border crossing points designated for international passenger traffic.

**Article 4****DURATION OF PASSPORTS VALIDITY**

The validity of diplomatic or service passports in the possession of nationals of either Party shall be at least six (6) months on the date of entry into the territory of the other Party.

**Article 5****RIGHTS OF AUTHORITIES**

1. This Agreement shall not exempt nationals of either Party holding diplomatic or service passports from the obligation to respect the legislations and regulations enforced in the territory of the other Party.
2. This Agreement does not affect the right of the competent authorities of either Party to refuse admission or to shorten the stay in its territory of nationals of the other Party, specified in Article 1, who are considered undesirable or likely to endanger public peace, public order, public health or national security.

**Article 6****SUSPENSION**

1. Either Party may temporarily suspend, partly or entirely, the implementation of this Agreement for reasons of national security, public order or public health.

2. The other Party must be notified through diplomatic channels within thirty (30) days about the suspension and re-entering into force of this Agreement.
3. The suspension of the implementation of this Agreement shall not affect the rights of nationals, mentioned in Articles 1 of this Agreement, who already stay in the territory of the receiving State.

#### **Article 7**

#### **SPECIMEN AND ISSUANCE OF PASSPORTS OR TRAVEL DOCUMENTS**

1. The Parties shall exchange specimens of their diplomatic and service passports through diplomatic channels within thirty (30) days of the entry into force of this Agreement.
2. In case of introduction of new diplomatic and service passports, as well as, modifications to the existing ones, the Parties shall transmit the specimens of the said passports and inform about any changes, to each other in writing, through diplomatic channels not later than thirty (30) days prior to their official introduction.
3. In case nationals of either Party lose or damage their diplomatic or service passports in the territory of the other Party, they shall immediately inform the competent authorities of the receiving country through the diplomatic mission or consular office of the country of their nationality. The diplomatic mission or consular office concerned shall issue to the aforementioned persons a document for returning to the country of their nationality, in conformity with the legislation of their country.

#### **Article 8**

#### **AMENDMENTS**

This Agreement may be amended only by mutual written consent of the Parties. Such amendment or revision shall enter into force in accordance with Article 10 paragraph 1 of this Agreement, and formed as integral parts of this Agreement.

#### **Article 9**

#### **DISPUTES SETTLEMENT**

Any difference or dispute arising between the Parties in relation to the implementation or interpretation of this Agreement shall be settled amicably by consultations and negotiations between the Parties without reference to any third party or an international tribunal.

**Article 10****ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION**

1. This Agreement shall enter into force thirty (30) days from the date of the receipt, through diplomatic channels, of the last written notification, by which the Parties shall formally communicate to each other that their respective internal procedures required for its entry into force have been completed.
2. This Agreement is signed for an indefinite period of time, unless either Party decides to terminate this Agreement by giving written notification to the other Party through diplomatic channels. The termination shall take effect ninety (90) days after the date of the receipt of the last written notification of termination by other Party.

**Done** at Jakarta, on April 24, 2012..... in two originals copies, in Indonesian, Hungarian, and English languages, all text being equally authentic. In case of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.

**FOR THE GOVERNMENT OF  
THE REPUBLIC OF INDONESIA**



**R.M. Marty M. Natalegawa**  
Minister of Foreign Affairs

**FOR THE GOVERNMENT OF  
HUNGARY**



**János Martonyi**  
Minister for Foreign Affairs